

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Ali Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- , *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Baharuddin Loppa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Kipas Putih Aksara, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1996.
- C.S.T. Kansil, dan Kansil Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1982.
- Carl J. Friederich, *Political Pthologi*, dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008.
- Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2000.
- Dep. P dan K, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Dionysios Spinellis “*Crime of Politicians in Office or Top Hat Criminality*”, paper presented at the 11th International Congress on Criminology, Budapest, 1993 and at the XV International Congress of Penal Law, Rio de Janeiro, 1994.
- Djoko prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1990.

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Tinjauan Khusus Terhadap "Proses Penyidikan Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006.
- Moch. Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Bandung: Penerbit Pustaka, 2004.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan system Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah pengembangan hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- , *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang: Undip, 2000.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: Program Magister Hukum Undip, Unsoed dan Untag, 2007.
- Robert Klitgaard, Abaroa, Ronald Maclean & Parris, H. Lindsey, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- , *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor, 1998.
- R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi : Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor : R. Schenkhuizen, 1953.
- Siti Sutami, *Hukum Administrasi Negara*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1999.
- Soebroto Brotodiredjo, *"Asas-asas Wewenang Kepolisian"*, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung : Penyunting DPM Sitompul, Edward Syahperenong, Tarsito, 1985.

Sударsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

The *Lexicon Webster Dictionary*, English-Language Institute of America, Inc, 1996.

Tjipto Soeroso, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Komplikasi yang menyertainya*, Masalah-Masalah Hukum No.4, Semarang : Fakultas Hukum, 2002.

W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

B. Karya Ilmiah

Barda Nawawi Arief, Makalah pada Seminar ‘*Penanggulangan tindak Pidana Korupsi di Era peningkatan Supremasi Hukum*’, Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia Semarang, 01 November 2001.

Implementasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Tugas Kepolisian Sebagai Penyidik dan Penyelidik Dengan Tujuan untuk Mengungkap Kasus Korupsi Dengan Lebih Mengaktifkan Bantuan Dan Peranan Masyarakat, Makalah disampaikan Oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, DRS. Sutanto, Jendral Polisi, Jakarta, 27 Maret 2006.

Satya Arinanto, *MK di Tengah Turbulensi Politik*, Dalam Concise Oxford Dictionary, turbulensi berasal dari kata *turbulence* yaitu *confused; not calm or stable*, Kompas, 23 Juni 2008.

Idham Azis, *Pedoman Administrasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penerimaan Pengaduan Masyarakat, Penyelidikan dan Penyidikan di Lingkungan Dit Tipidkor Bareskrim Polri*, Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2014.

C. Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, TLN No. 3209.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, No.30, LN No.137.

Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN No. 134 TLN No.4150, Penjelasan Umum.

- Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, TLN No. 134.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, *Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 *Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.
- Surat Keputusan Kabareskrim No.Pol. : Skep/82/XII/2006/Bareskrim tanggal 15 Desember 2006.*
- Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor : STR/442/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang Data Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Jajaran Polda Jateng tahun 2017 dan Prioritas Penanganan Tindak Pidana Korupsi tahun 2018.*
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*
- Perjanjian Kerjasama Antara Kementrian Dalam Negeri RI, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 119-49 Tahun 2018, B-369/F/Fjp/02/2018, B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.*